**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI TANJUNGPINANG
TAHUN 2017-2018 (STUDI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO.13/PRT/M/2011)**

Julianti¹, Kustiawan², Yudhanto Satyagraha Adiputra³

Juliantisrik99721@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The road maintenance policy plays an important role in road handling in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 13 / PRT / M / 2011 as prevention, maintenance and repair in order to maintain a steady road condition in accordance with the level of service and ability when the road is built and operated until it reaches its age. the plan that has been determined. The purpose of this study was to determine the implementation of the City Road Maintenance Policy in Tanjungpinang 2017-2018 (study of the Minister of Public Works Regulation Number: 13 / PRT / M / 2011) regarding the procedures for road maintenance and surveillance. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The focus of this study uses the theory of George C. Edward III (in Leo Agustino, 2020: 154-159) by looking at aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. There are 8 informants. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of city road maintenance policies in Tanjungpinang was hampered by the lack of quantity and quality of human resources, complete facilities and infrastructure but lack of maintenance. The disposition as a whole has gone well, it's just that there is no direct public complaint service to the Public Works Office. Standard Operational Procedure for road maintenance does not yet exist. It still refers to Regulation of the Minister of Public Works No. 13 of 2011. Besides that, the community development sector only carries out periodic maintenance while routine maintenance is not carried out due to lack of human resources. The budget comes from the APBN and APBD. In 2017 there was carrying out road maintenance, it was just that the budget was very small than expected, in 2018 there was no budget for road maintenance. This also makes the implementation of city road maintenance in Tanjungpinang not running effectively and optimally.

Keywords: Policy Implementation, Road Maintenance

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan, sedangkan penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Kerusakan jalan merupakan permasalahan dan terdapat kerugian bagi pengguna jalan, seperti jarak tempuh yang jauh dari sebelumnya, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Banyak jalan-jalan utama di kota Tanjungpinang perlu dibenahi setiap ruas jalan sangat memberikan dampak yang sangat serius dan berbahaya bagi pengguna jalan kondisi ini timbul karena tidak terpantaunya oleh pemerintah. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya dikota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Kepulauan Riau diantaranya pemeliharaan jalan-jalan sebagai akses yang memudahkan untuk mobilitas penduduk yang padat. Panjang ruas jalan kota Tanjungpinang 419.83 km berdasarkan draf keputusan walikota Tanjungpinang nomor Tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 437 Tahun 2016 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kota Tanjungpinang yang sebelumnya panjang ruas jalan Tanjungpinang 399.576 km.

Table 1.1 Kewenangan Penanganan Jalan diwilayah Kota Tanjungpinang

No	Kewenangan Jalan	Panjang Ruas (KM)
1.	Jalan Nasional	33.16
2.	Jalan Provinsi	70.23
3	Jalan Kota	419.83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga, 2016

Tabel 1.2 Rekapitulasi Daftar Ruas Jalan Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Panjang Ruas (KM)
1	Kecamatan Tanjungpinang Kota	54.41
2	Kecamatan Tanjungpinang Barat	46.15
3	Kecamatan Bukit Bestari	66.84
4	Kecamatan Tanjungpinang Timur	252.43
TOTAL		419.83

Sumber: Draft Surat Keterangan Jalan Kota Tanjungpinang, 2017

Table 1.3 Panjang dan persentase kondisi jalan kota yang rusak di Tanjungpinang tahun 2017-2018

No	Tahun	Kondisi Jalan Kota Tanjungpinang			
		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		KM	(%)	KM	(%)
1	2017	53,436	13.19	80,287	19.81
2	2018	54,037	13.13	77,767	19.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga, 2017

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa total panjang ruas jalan kota 419.83 km. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ruas Jalan Kota Tanjungpinang, panjang ruas jalan Kecamatan Tanjungpinang Kota 54.41 km, panjang ruas jalan Kecamatan Tanjung Pinang Barat 46.15 km , panjang ruas jalan Kecamatan Bukit Bestari 66.84 km dan panjang ruas jalan Kecamatan Tanjungpinang Timur 252.43 km. Terdapat kondisi jalan kota yang rusak di Tanjungpinang berdasarkan tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 kondisi rusak ringan 53,436 km atau 13.19% sedangkan kondisi rusak berat 80,287 km atau 19.81%. Sedangkan tahun 2018 rusak ringan 54,037 km atau 13.33% dan kondisi rusak berat 77,767 km atau 19.18%.

Dari data kerusakan jalan kota Tanjungpinang diketahui bahwa pemeliharaan jalan masih terdapat jalan rusak ringan maupun rusak berat tahun 2017-2018 maka peneliti ingin melihat sejauhmana implementasi kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada Bidang Bina Marga seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan Rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitas jalan yang masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan untuk melakukan survey pemeliharaan jalan yang kemudian digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang dilakukan.

Pemeliharaan kerusakan jalan perlu dilakukan dengan tepat waktu dan tepat guna agar jalan tersebut tersebut dapat berfungsi sesuai dengan manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan monitoring perawatan dan perbaikan jalan, yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang telah ditetapkan.

II. Metode Penelitian

Pendekatan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2015:11) karena sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena dapat bertemu langsung. Selanjutnya dapat mendeskripsikan dan informan dan juga dapat diteliti secara mendalam. Penelitian bisa lebih berjalan subyektif. Adanya pemahaman khusus dalam menganalisa oleh peneliti melalui data-data yang telah ditetapkan. Sehingga mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memperoleh data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan dan dokumentasi resmi lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fokus penelitian ini menggunakan teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yaitu pada bab ini dapat diuraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, peneliti juga melakukan *interview* (wawancara) terhadap informan. Wawancara dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Tanjungpinang ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan.

Menurut model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berhubungan. Melalui pembahasan ini peneliti dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018.

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kota di Tanjungpinang.

Rencana umum pemeliharaan jalan, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13/2011 pasal 3 penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan. Rencana umum tersebut meliputi, sistem informasi, sistem manajemen aset dan rencana penanganan pemeliharaan jalan. Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan. Sedangkan data yang dimaksud adalah data inventarisasi jalan dan kondisi jalan yaitu Data Dasar Prasarana Jalan Kota Tanjungpinang.

Rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/2011 pasal 3 ayat (2) huruf c. mencakup rencana pemeliharaan terhadap lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija. Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif. Penanganan pemeliharaan jalan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan yang lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan seperti hujan yang menyebabkan air tergenang dan muatan truk yang melebihi kapasitas, serta mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.

Penanganan pemeliharaan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan. Penanganan jalan secara reaktif dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana. Kegiatan penanganan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan dalam dokumen rencana penanganan jalan sesuai dengan persyaratan teknis rencana penanganan pemeliharaan jalan yang diatur dalam tabel penentuan nilai RCI (*Road Conditional Index*) jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut maka perlu melihat Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 tahun 2011 Pasal 18 tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan pemeliharaan jalan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan bahkan rekonstruksi jalan pada jalan yang mengalami kerusakan berat sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang diatur dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Sumber Daya

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena tidak akan berjalan efektif jika sumberdayanya kurang atau tidak memadai. Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2020:155-156) bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan ada empat indikator, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang masih ada kendala dari bahan yang kadaluarsa hingga mengalami kerusakan akibat pemakaian karena jarang perawatan.

c. Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk insentif implementasi kebijakan pemeliharaan jalan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, anggarannya berasal dari dana Alokasi Umum untuk pemeliharaan rutin jalan (swakelola).

d. Struktur Birokrasi,

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Peraturan Walikota Tanjungpinang Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bab III pasal 3 dalam melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan di bidang bina marga serta melaksanakan penyusunan dan pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan merupakan Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang khususnya di Bidang Bidang Bina Marga.

Dari hasil penelitian yang didapat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan berdasarkan pada hasil musrenbang, usulan didapatkan dari keluhan masyarakat, survey langsung ke lokasi, dan melihat dari segi prioritas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/ PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dikatakan bahwa pada pasal 1 ayat 12 bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan melakukan perencanaan jalan meliputi pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan rehabilitasi jalan merupakan peraturan yang dibuat oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar dilaksanakan pemeliharaan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Dimana sebagaimana dalam peraturan menteri dalam pelaksanaan idealnya harus berdasarkan juga pada peraturan menteri yaitu pemeliharaan jalan pada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota dengan melakukan pemeliharaan rutin, berkala jalan, dan rehabilitasi jalan sesuai kondisi jalan, dan bukan hanya berdasarkan pada hasil musrenbang, usulan serta pengeluhan dari masyarakat, serta survey langsung ke lokasi, dan melihat dari segi prioritas saja. Penyebab lain tidak terlaksananya pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah masalah pembebasan lahan merupakan kendala buat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan pemeliharaan jalan, karena untuk pembebasan lahan harus disetujui oleh masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018 studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Dari 4 kecamatan, Bukit Bestari, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Barat terbagi menjadi tiga status jalan yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten/Kota. Untuk di Kota Tanjungpinang panjang ruas Jalan Nasional 33.16 km, Jalan Provinsi 70.23 km dan Jalan Kota 419.83 km. Dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan masih terdapat hambatan sehingga belum berjalan secara optimal dan efektif yang dapat dilihat dari persentase kondisi jalan kota yang rusak di Tanjungpinang tahun 2017-2018. Hal itu didasari oleh teori implementasi kebijakan model George Edward III (2020:154-259) yang memiliki empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi terbagi menjadi tiga indikator yang dipakai dalam menentukan keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga menjadikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan menjadi acuan implementasi kebijakan pemeliharaan jalan. Dalam pasal 25 selain peran Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga sebagai pelaksana, ada peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan camat, lurah serta RT/RW sebelum melaksanakan penyelenggaraan kebijakan pemeliharaan jalan. Perencanaan dan pengendalian Pemerintah Daerah dalam koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan pelaporan masing-masing sudah berjalan dengan baik.

Bahkan Bidang Bina Marga juga melakukan rapat ditingkat dinas rapat rutin 2 minggu sekali, dan tingkat kepala seksi bidang seminggu sekali dan tingkat kepala seksi setiap hari *briefing* selama 1 jam.

Namun ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan khususnya di ruas jalan D.I. Panjaitan seperti pembongkaran jalan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kepri yang tidak sesuai dengan koordinasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum karena sering dilakukan pembongkaran struktur jalan menjadi tidak rata dan tidak sesuai dengan penutupan jalan kembali seperti semula ini menjadi kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Tanjungpinang menjadi tidak optimal dan tidak memberikan kenyamanan untuk pengendara jalan.

2. Aspek Sumberdaya

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf atau Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, wewenang dan fasilitas sarana prasarana. Dalam hal ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga mengemukakan bahwa biaya yang digunakan dalam proses pemeliharaan jalan berasal dari APBD dan APBN. Keluaran kebijakan ada proses ketentuan masing-masing jadi terkait keputusan pusat atau walikota peranan dalam sumber dananya APBN dan APBD.

APBN besaran dana tergantung data teknis pemerintah kota Tanjungpinang data kondisi jalan, keuangan APBD Tanjungpinang berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat. Pada tahun 2017 pelaksanaan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang sumber dana dari APBD nilainya masih minim yang diharapkan, sedangkan tahun 2018 tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan baik dari APBD maupun APBN. Banyak keluhan dari masyarakat karena banyak jalan yang rusak dan berlobang namun karena anggaran sangat minim sehingga kadang pelaksana menggunakan biaya pribadi untuk menutup jalan yg rusak. Hal itu belum cukup karena banyak jalan yang rusak parah dan anggaran yang minim tersebut digunakan untuk jalan yang diprioritaskan saja.

Hasil akhir implementasi kebijakan masih terdapat kendala yang mempengaruhi Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018 adalah kurangnya biaya dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang, sumber daya manusia masih terbatas jauh dari yang diharapkan, dan kurang memadai sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang karena kurangnya perawatan.

3. Aspek Disposisi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengenai sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pemeliharaan jalan berdasarkan usulan, hasil musrenbang, skala prioritas, hasil survey, pengaduan masyarakat dipantau melalui akun facebook, berita dan didapatkan dari layanan kominfo, hal ini tentu saja belum efektif karena Tidak ada layanan pengaduan masyarakat secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang khususnya bidang bina marga sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Untuk insentif pemeliharaan jalan dikeluarkan dari Dana Alokasi Umum untuk program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan se-kota Tanjungpinang (Swakelola).

4. Struktur Birokrasi

Pelaksana dalam implementasi kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Tanjungpinang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga khususnya tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsinya sebagai pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Hasil akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Bidang Bina Marga belum ada *Standar Operating Procedures* (SOP) khusus yang menjadi pedoman pemeliharaan jalan kota Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

Buku

Agustino, Leo (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta
Gunawan, Imam.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosidakarya
Agustino, Leo. 2006a. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Jurnal/Skripsi

Fandri, Ulfi. (2016). Pengawasan Pemeliharaan Jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Permana, Suci Syciliawati. (2019). Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Tanjungpinang Tahun 2017-2018
Mantik Juang, dkk. Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kabupaten oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Studi Kasus Kecamatan Selemadeg Barat, Universitas Udayana
Silban, Hendra Natalia. (2016) Efektifitas Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Tanjungpinang

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang
Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 437 Tahun 2016 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Kota Tanjungpinang
Laporan Kinerja TA. 2018 Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.